

Review

Rencana Strategis

BPS Provinsi Kalimantan Timur

2015-2019



Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

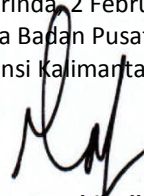
Kata Pengantar

Dokumen Reviu Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 ini bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 yang didasarkan pada pelaksanaan kinerja di Tahun 2015. Kajian pada reviu ini mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terhadap evaluasi atas dokumen perencanaan BPS. Kajian dimaksud menghasilkan penambahan satu (1) indikator kinerja pada sasaran strategis ke-tiga (3) pada tujuan ke-dua (2) tanpa merubah sasaran strategis dan tujuan BPS di tahun 2015-2019.

Penambahan indikator tersebut, seluruh jajaran BPS Provinsi Kalimantan Timur diharapkan lebih mudah mencapai sasaran strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur serta menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi BPS sebagai Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua dalam upaya mencapai sasaran-sasaran pembangunan statistik yang ditetapkan.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 maupun reviu ini disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN).

Samarinda, 2 Februari 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Timur,



M. Habibullah

Ringkasan Eksekutif

Undang-undang No. 16 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1999, menyatakan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektivitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015–2019, BPS Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS telah menetapkan visi “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan (3) membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS Provinsi Kalimantan Timur memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu: (1) peningkatan kualitas data statistik; (2) peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan (3) Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS Provinsi Kalimantan Timur berupaya terus-menerus untuk meningkatkan: (1) kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik); (2) kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaannya; dan (3) kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya. Keseluruhan tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni: (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS); (2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL); dan (3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

BPS Provinsi Kalimantan Timur merupakan instansi vertikal BPS yang melaksanakan tugas dan fungsi BPS di daerah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka pelaksanaan perannya tersebut,

BPS Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur menjabarkan tujuan dan sasaran strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur untuk dijadikan pedoman bagi seluruh jajaran BPS Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan perannya sebagai instansi vertikal BPS di daerah Provinsi Kalimantan Timur. Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015-2019 disusun dengan berpedoman pada Renstra BPS 2015-2019.

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR SINGKATAN | xi |
| BAB 1 - PENDAHULUAN | |
| 1.1 Kondisi Umum | 1 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan | 3 |
| BAB 2 – VISI, MISI DAN TUJUAN BADAN PUSAT STATISTIK | |
| 2.1 Visi Badan Pusat Statistik | 7 |
| 2.2 Misi Badan Pusat Statistik | 7 |
| 2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik | 10 |
| 2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik | 13 |
| 2.5 Nilai Nilai Inti Badan Pusat Statistik | 14 |
| BAB 3 – ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional..... | 18 |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pembangunan Statistik..... | 24 |
| 3.3 Kerangka Regulasi | 33 |
| 3.4 Kerangka Kelembagaan..... | 35 |
| BAB 4 – TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | |
| 4.1 Target Kinerja..... | 39 |
| 4.2 Kerangka Pendanaan | 43 |
| BAB 5 – PENUTUP | |
| 5.1 Penutup | 48 |
| LAMPIRAN | |
| Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Pusat Statistik | 51 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 3-1 : Tahapan RPJPN 2005-2025..... | 51 |
|---|----|

Daftar Tabel

| | | |
|-----------|---|----|
| Tabel 2-1 | Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019..... | 9 |
| Tabel 2-2 | Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan | 12 |
| Tabel 2-3 | Indikator Tujuan dan Target BPS 2015-2019 | 14 |
| Tabel 2-4 | Tujuan dan Sasaran Strategis BPS | 15 |
| Tabel 3-1 | Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi..... | 23 |
| Tabel 3-2 | Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019..... | 27 |
| Tabel 4-1 | Indikator Kinerja Sasaran Strategis | 41 |
| Tabel 4-2 | Matriks Pendanaan..... | 45 |

Daftar Singkatan

| | |
|-----------------|---|
| BMN | Barang Milik Negara |
| BPK | Badan Pemeriksa Keuangan |
| BPS | Badan Pusat Statistik |
| BPS-QAF | Badan Pusat Statistik-Quality Assurance Framework |
| Cerdas | Change and Reform for the Development of Statistics |
| DJKN | Direktorat Jenderal Kekayaan Negara |
| IKSS | Indikator Kinerja Sasaran Strategis |
| IKP | Indikator Kinerja Program |
| IKK | Indikator Kinerja Kegiatan |
| JFU | Jabatan Fungsional Umum |
| JFT | Jabatan Fungsional Tertentu |
| K/L | Kementerian/Lembaga |
| KemenPAN dan RB | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
| LAKIP | Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
| Program DMPTTL | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya |
| Program PPAA | Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur |
| Program PPIS | Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik |
| Program PSPA | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| RPJMN | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional |
| RPJPN | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional |
| SDG's | Sustainable Development Goals |
| SDM | Sumber Daya Manusia |
| SE | Sensus Ekonomi |
| SIMPEG | Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian |
| SNA | System National Account |

| | |
|---------|------------------------------------|
| SSN | Sistem Statistik Nasional |
| Statcap | Statistical Capacity Building |
| UNSTAT | United Nations Statistics Division |
| WTP | Wajar Tanpa Pengecualian |

BAB 1

Pendahuluan



Rencana Strategis Lembaga merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Lembaga untuk mencapai target organisasi yang merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, dengan Visi: Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yang ditandai dengan terwujudnya bangsa Indonesia yang memiliki daya saing yang tinggi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 diarahkan pada model pembangunan ekonomi hijau sebagai rezim pembangunan untuk menjaga keseimbangan antara pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta mewujudkan kondisi masyarakat yang lebih baik dan berkeadilan sosial dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Dalam rangka mendukung RPJMN periode ketiga dan pencapaian prioritas nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, serta mendukung RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Rencana strategis yang jelas, relevan, dan terukur, dengan ditentukannya ukuran kinerja dalam bentuk output dan outcome, merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting).

1.1. Kondisi Umum

Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Provinsi Kalimantan Timur menjadi sumber informasi pembangunan yang dapat dipercaya, sebagaimana telah digunakan para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2013 sebesar 1,59% melambat bila dibandingkan dengan tahun 2009 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,28%. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku tahun 2013 mencapai Rp 425,4 triliun, dengan pendapatan per kapita sebesar Rp 44,8 juta. Selain indikator ekonomi, indikator kesejahteraan rakyat mengalami perbaikan, seperti Indek Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 75,11 pada tahun 2009 menjadi 77,33 pada tahun 2013. Tingkat kemiskinan mengalami penurunan dari 7,86 % di tahun 2009, menjadi 6,38 % pada tahun 2013. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dari 10,83 % di tahun 2009, menjadi 8,04 % pada tahun 2013. Dengan kondisi yang demikian, berarti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mengalami perbaikan.

Pencapaian pembangunan di atas merupakan modal berharga bagi upaya perbaikan dan peningkatan daya saing Kalimantan Timur pada periode berikutnya yang merupakan prioritas arah pembangunan nasional periode ketiga tahun 2015-2019. Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional periode tersebut diperlukan perencanaan dan evaluasi yang tepat

berdasarkan data dan informasi statistik yang berkualitas. Disinilah BPS menjalankan perannya sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar yang berkualitas.

Selama periode 2010-2014, BPS telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi, di antaranya adalah:

1. Data kependudukan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan berbagai survei rutin di bidang sosial, antara lain Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi, Penyusunan Statistik Modal Sosial, dan Studi Pengukuran Tingkat Kebahagiaan.
2. Data pertanian hasil Sensus Pertanian (ST) tahun 2013, Data Produksi Padi dan Palawija, Data Perusahaan Perkebunan, Data Perusahaan Peternakan dan Rumah Potong Hewan.
3. Angka inflasi, PDRB triwulanan dan tahunan, ekspor dan impor, Industri Besar/Sedang, Nilai Tukar Petani, dan berbagai survei rutin di bidang ekonomi yang dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu, antara lain Survei Industri Mikro dan Kecil Triwulanan, Survei Tanaman Pangan/Ubinan, Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian, Survei Statistik Harga Perdagangan Besar, Studi Penyusunan Stok Kapital, Survei di bidang Jasa Pariwisata, Survei Tendensi Bisnis, dan Survei Tendensi Konsumen.

Dalam hal diseminasi data, pengembangan aplikasi *e-government* untuk kepentingan pengguna data BPS Provinsi Kalimantan Timur memberikan kemudahan pelayanan data statistik kepada publik, seperti:

1. Pelayanan Statistik Terpadu di kantor BPS Provinsi Kalimantan timur
Sampai tahun 2014, pusat layanan terpadu BPS Provinsi Kalimantan Timur tercatat telah melayani 13.484 pengguna data.
2. Aplikasi Data Kaltim berbasis Android
Aplikasi Data Kaltim berbasis Android merupakan aplikasi yang dapat digunakan pada smartphone berbasis android untuk melihat data-data strategis yang disajikan secara series per tahun. Sejak tahun 2014 sampai saat ini aplikasi sudah di unduh 326 kali unduhan.
3. Penyempurnaan dan Pengembangan Kemasan Statistik Elektronik dan Website
Sampai saat ini website BPS Provinsi Kalimantan Timur tetap terus dapat diakses dan terus dikembangkan. Jumlah pengunjung ditahun 2013 sebanyak 24.389 dan di tahun 2014 sebanyak 35.977 pengunjung unik.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Dalam melaksanakan tugas, BPS Provinsi Kalimantan Timur telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar. BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Secara kelembagaan, BPS Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjelaskan bahwa BPS Daerah (BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota) dibentuk untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS di Provinsi Kalimantan Timur, BPS Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berkoordinasi dengan BPS Pusat dan BPS Kabupaten/Kota di bawahnya.

Selama kurun waktu 2010-2014 terjadi beberapa pemekaran wilayah administrasi di Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2012 disahkan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur. Dengan terbentuknya daerah otonom baru sebagai pemekaran dari Provinsi Kalimantan Timur tersebut, tentunya kebutuhan akan data statistik semakin diperlukan dalam melakukan pembangunan khususnya di daerah otonom baru tersebut. Disinilah BPS Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi vertikal BPS dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan data statistik yang berkualitas dalam rangka membantu pembangunan di daerah otonom tersebut.

1.2.2. Permasalahan

BPS Provinsi Kalimantan Timur telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2015 – 2019, baik itu permasalahan internal maupun permasalahan eksternal.

Kendala maupun permasalahan BPS Provinsi Kalimantan Timur harus mendapatkan respon yang tepat, sehingga citra BPS Provinsi Kalimantan Timur dari sudut pandang responden sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua terus dapat meningkat.

Peningkatan kebutuhan pengguna terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*) dan lebih murah (*cheaper*). Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu Strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data sangat dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik yang lebih berkualitas.

Respondent burden atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Provinsi Kalimantan Timur adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Provinsi Kalimantan Timur dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui.

Adanya pemekaran daerah (pemekaran Provinsi dan pemekaran Kabupaten) membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi geografis daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data.

Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad hoc* yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.

Meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan terhambat oleh permasalahan keterbatasan jumlah ketersediaan SDM statistik yang profesional, juga terhambat oleh keterbatasan sarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Pencanaan program *one man one PC* dimana setiap pegawai BPS akan mendapatkan fasilitas PC untuk membantu kelancaran tugas dan fungsinya di BPS Provinsi Kalimantan Timur masih belum dapat tercapai. Disamping itu PC yang berada di pusat pengolahan data BPS Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini masih sangat terbatas

tidak sebanding dengan aktivitas survei sektoral dan *ad hoc* yang diselenggarakan sehingga menjadi hambatan dalam penyelesaian pengolahan dan penyajian data yang tepat waktu.

Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi *konten*. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah.

Dalam pelaksanaan survei atau sensus yang dilakukan BPS Provinsi Kalimantan Timur faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Saat ini sejumlah kelemahan pada aspek sumber daya manusia di BPS Provinsi Kalimantan Timur telah teridentifikasi. Permasalahan yang ada antara lain, belum terciptanya perencanaan kebutuhan SDM berdasarkan pemetaan kompetensi. Kebutuhan SDM di BPS Provinsi Kalimantan Timur saat ini masih dilakukan dengan memperhatikan posisi *lowong* (*vacant*) pada struktur organisasi. Permasalahan lain dalam rumpun SDM adalah BPS Provinsi Kalimantan Timur masih belum memiliki sistem perencanaan karir, analisis jabatan, sistem mutasi, dan standar kompetensi yang dapat menunjang kegiatan dan pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. Belum terpenuhinya jabatan struktural di BPS Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Timur. Jabatan struktural yang belum terpenuhi tersebut untuk sementara dilakukan penunjukan pejabat pelaksana tugas atau pejabat pelaksana harian.

BAB 2

Visi, Misi, dan Tujuan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur



2.1 Visi Badan Pusat Statistik

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2015- 2019 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, serta visi Pembangunan daerah 2013-2018 “Mewujudkan Kalimantan Timur Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan”, BPS Provinsi Kalimantan Timur berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah di bidang statistik.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti 1. Reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi; dan 3. Kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas. Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

BPS Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi vertikal yang merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia sehingga dalam menetapkan visi dan misi mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh BPS RI tahun 2015-2019:

“Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”

(“The Agent of Trustworthy Statistical Data for All”)

Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial) baik pengguna data nasional maupun internasional.

Dengan visi BPS 2015-2019, eksistensi BPS Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik

2.2 Misi Badan Pusat Statistik

Misi BPS Provinsi Kalimantan Timur disesuaikan dengan Misi BPS yang dirumuskan dengan memperhatikan misi RPJMN 2015-2019 dan tugas, fungsi, dan kewenangan BPS. Perumusan misi BPS juga dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) mencakup semua pesan yang terdapat dalam visi, (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai, (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana termasuk instansi pemerintah yang akan dilayani oleh, dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan.

Pernyataan misi BPS yang dikaitkan dengan Visi BPS dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 2-1 Pernyataan Visi dan Misi BPS 2015-2019

| | | |
|--------------------|---|---|
| VISI BPS 2015-2019 | Pelopor data statistik terpercaya untuk semua | MISI BPS 2015 -2019 |
| | | 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional |
| | | 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik |
| | | 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan |

Misi Badan Pusat Statistik tahun 2015-2019 mengandung arti:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional

Menyediakan data statistik ...

“Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No.86 tahun 2007)”.

... berkualitas ...

“Berkualitas berarti data statistik yang dihasilkan BPS memenuhi dimensi kualitas yakni relevan, akurat, disajikan tepat waktu, koheren, dapat diakses, dan dapat diinterpretasikan”.

... melalui kegiatan statistik yang terintegrasi ...

“Kata terintegrasi bermakna bahwa penyelenggarakan kegiatan statistik perlu lebih mengedepankan pendekatan fungsional, serta mengurangi pelaksanaan yang bersifat terkotak-kotak (silo thinking). Pendekatan fungsional berarti alur proses dari pengumpulan data, pengolahan data hingga diseminasi data dilakukan secara terintegrasi antar subject matter .

Terintegrasi juga berarti penyelenggaraan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan". (UU no. 16 tahun 1997)".
... dan berstandar internasional...

"Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam Fundamental Principle of Official Statistics".

2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik

Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan ...

"Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus menerus dan berkelanjutan. (UU no. 16 tahun 1997)".

... pembinaan dan koordinasi ...

"BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. (UU no. 16 tahun 1997).

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Dalam melakukan pembinaan statistik, BPS dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swasta, dan atau unsur masyarakat lainnya. Upaya pembinaan statistik yang dilakukan BPS sesuai PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, meliputi:

- a). Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;
- b). Pengembangan statistik sebagai ilmu;
- c). Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;
- d). Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;
- e). Pengembangan sistem informasi statistik;
- f). Peningkatan penyebarluasan informasi statistik;

- g). Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;
- h). Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

Koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Pelaksanaan kegiatan statistik;
- b. Pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Koordinasi dan atau kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat dilaksanakan atas dasar prinsip kemitraan. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik dilakukan dalam rangka membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional. Koordinasi dan atau kerjasama pelaksanaan kegiatan statistik mencakup perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan atau analisis statistik”.

3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan

Membangun insan statistik ...

“Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah”.

... yang profesional...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

... berintegritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

2.3 Tujuan Badan Pusat Statistik

Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tujuan BPS yang mengacu pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi

statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik.

Rumusan Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel. 2-2 Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS 2015-2019

| | | |
|---------------------------|--|---|
| VISI BPS 2015-2019 | Pelopor data statistik terpercaya untuk semua | MISI BPS 2015 -2019 |
| | | 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional |
| | | 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik |
| | | 3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan |
| TUJUAN 2019 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas data statistik 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel | |

Adapun tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik, terkait dengan:
 - 1.1 Misi ke-1 : Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional,
 - 1.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
2. Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, terkait dengan:
 - 2.1 Misi ke-2 : Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik,
 - 2.2 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.
3. Tujuan 3 : Peningkatan birokrasi yang akuntabel, terkait dengan:

3.1 Misi ke-3 : Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Keberhasilan BPS Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan perannya sebagai instansi vertikal BPS di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dilihat dari keberhasilan dari tujuannya. Hal ini sesuai dengan penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented goverment*). Untuk dapat mengukur keberhasilan tujuan BPS Daerah, BPS telah menetapkan secara spesifik indikator dari masing-masing tujuan. Keberhasilan tujuan pertama diukur dari persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Tujuan kedua diukur dari persentase konsumen yang puas akan layanan data BPS. Sementara keberhasilan tujuan yang ketiga diukur dari hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat BPS RI. BPS Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan target dari masing-masing indikator tujuan untuk periode 2015-2019.

Tabel. 2. Tujuan dan Indikator Tujuan BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019

| No | TUJUAN | | TARGET | | | | |
|-----|--|---|--------|------|------|------|------|
| | URAIAN | INDIKATOR | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1 | Peningkatan kualitas data statistik | Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik | 85% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 2 | Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik | Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS | 90% | 91% | 91% | 92% | 92% |
| 3 | Peningkatan birokrasi yang akuntabel | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |

2.4 Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS Provinsi Kalimantan Timur. Program BPS Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan *eksternal*) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS Provinsi Kalimantan Timur (pelayanan *internal*). Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4. Tujuan dan Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019

| TUJUAN | | SASARAN STRATEGIS TEKNIS |
|--|------|--|
| T1. Peningkatan kualitas data statistik | SS1. | Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS |
| | SS2. | Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>) |
| T2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik | SS3. | Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>) |
| T3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel | SS4. | Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS |
| | SS5. | Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS |

Secara ringkas rumusan indikator pada sasaran strategis pembangunan statistik daerah BPS Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mencapai Visi BPS dan mewujudkan Misi BPS untuk kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama "Peningkatan kualitas data statistik", adalah:

1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS.

Dengan indikator sasaran:

- 1.1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik
- 1.1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama
- 1.1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS
- 1.1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu
- 1.1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu

- 1.1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu
- 1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (*respondent engagement*)
 Dengan indikator sasaran:
- 1.2.1. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan rumah tangga
 - 1.2.2. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan usaha
 - 1.2.3. Persentase pemasukan dokumen (*response rate*) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik", adalah:
- 2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (*user engagement*).
 Dengan indikator sasaran:
 - 2.1.1. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS
 - 2.1.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website* BPS
 - 2.1.3. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional
 - 2.1.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS
 - 2.1.5. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS
3. Sasaran strategis dari tujuan ketiga: "Peningkatan birokrasi yang akuntabel", adalah:
- 3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
 Dengan indikator sasaran:
 - 3.1.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu
 - 3.1.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I
 - 3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
 Dengan indikator sasaran:
 - 3.2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

2.5 Nilai-Nilai Inti Badan Pusat Statistik

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi vertikal yang merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia nilai inti yang ditetapkan di BPS Provinsi Kalimantan Timur sama dengan

nilai inti yang telah ditetapkan oleh BPS, yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS . Nilai-nilai inti BPS tersebut adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1. Nilai-Nilai Inti (Core Values) BPS

Nilai-nilai inti BPS ini merupakan pondasi yang kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Adapun penjabaran dari nilai-nilai Inti BPS ini adalah sebagai berikut:

1. Profesional

Profesional merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **K o m p e t e n** mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban,
- b. **E f e k t i f** memberikan hasil maksimal,
- c. **E f i s i e n** mengerjakan setiap tugas secara produktif, dengan sumber daya minimal,
- d. **I n o v a t i f** selalu melakukan pembaruan dan atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran diri secara terus-menerus,
- e. **S i s t e m i k** meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses sehingga pekerjaan yang satu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pekerjaan yang lain.

2. Integritas

Integritas merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam

pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **Dedikasi** memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi,
- b. **Disiplin** melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
- c. **Konsisten** selarasnya kata dengan perbuatan,
- d. **Terbuka** menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik dari berbagai pihak,
- e. **Akuntabel** bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur.

3. Amanah

Amanah merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. **Terpercaya** melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual,
- b. **Jujur** melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas,
- c. **Tulus** melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan (pribadi, kelompok, dan golongan), serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan Yang Maha Esa,
- d. **Adil** menempatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

BAB 3

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, Dan Kerangka Kelembagaan



3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1 Agenda Prioritas

Dalam kerangka pencapaian visi jangka panjang, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, RPJPN 2005-2025 mengamanatkan bahwa RPJMN ke-3 periode 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan iptek.



Gambar 3-1 Tahapan RPJPN 2005-2025ⁱ

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawacita pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan statistik yang dilakukan oleh BPS, antara lain:

1. Nawacita kesatu - Menghadirkan kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Dukungan BPS untuk agenda prioritas ini dengan menyediakan data yang terkait dengan nilai kebangsaan dan keamanan.
2. Nawacita kedua – Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk maksud tersebut, BPS telah melaksanakan reformasi birokrasi dimulai dengan persiapan transformasi melalui program Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics (Statcap CERDAS) sejak tahun 2008.
3. Nawacita ketiga – Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. BPS mendukung agenda prioritas ini melalui penyediaan data spasial yang dilaksanakan secara berkala.
4. Nawacita keempat - Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. BPS menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih, Bebas dan Melayani (WBBM), Strategi Nasional Program Pencegahan Korupsi (Stranas PPK), penerapan zona integritas.
5. Nawacita kelima – Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik kesejahteraan rakyat seperti data konsumsi, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.
6. Nawacita keenam - Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya. BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data yang terkait statistik produksi dan distribusi seperti data pertanian, industri, ekspor-impor, dan lain sebagainya.
7. Nawacita ketujuh – Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, BPS mendukung agenda prioritas dalam menyediakan data ekonomi makro seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan lain sebagainya.
8. Nawacita kedelapan – Melakukan revolusi karakter bangsa, BPS mendukung agenda prioritas melalui jalur pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) dan pengembangan SDM di pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat).
9. Nawacita kesembilan – Memperteguh ke-bhinneka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia, BPS mendukung agenda prioritas melalui penyediaan data ketahanan sosial, seperti statistik modal sosial, nilai kebangsaan, indeks demokrasi indonesia, dan lain sebagainya.

3.1.2. Quickwins dan Program Lanjutan

Quickwins dan program lanjutan merupakan bentuk akselerasi program yang telah diselaraskan dengan sembilan agenda prioritas pemerintah (Nawacita) dan Trisakti ke dalam bentuk kegiatan prioritas. Selanjutnya beberapa prioritas pembangunan nasional tersebut diharapkan dapat memberikan landasan yang baik bagi pelaksanaan program dan kegiatan nasional dalam RPJMN 2015-2019. Sehingga sasaran-sasaran pembangunan dapat tercapai dan dapat meningkatkan kesejahteraan serta bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Quickwins BPS adalah metode pengukuran data kemiskinan yang disempurnakan. Quickwins BPS digunakan untuk mendukung quickwins nasional yaitu penyempurnaan data kemiskinan dengan sasaran jumlah penduduk miskin menjadi 10,25% dari 11,25%.

Sedangkan program lanjutan untuk BPS ada pada kegiatan Publikasi Indeks kesetaraan dan Keadilan Gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disinsentif Alokasi Dana Desa. Sasaran kegiatan ini adalah menguatnya peran lembaga yang memberikan perspektif gender dengan indikator jumlah publikasi/laporan Indeks Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender per kabupaten yang terbit tepat waktu.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BPS

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (*faster*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Rancangan Awal RPJMN 2015-2019, maka BPS menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya.

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|--|--|---|---|
| T.1. Peningkatan kualitas data statistik | SS.1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS | 1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan publikasi survei yang mencantumkan ukuran kualitas, 2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik, 3. Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional. |
| | SS.1.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>) | 2. Peningkatan response rate | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data, 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS. |
| T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik | SS.2.1. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>) | 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik, 2. Meningkatkan <i>Customer Relationship Management</i>, 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik. |
| | | 2. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas <i>website</i> BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai, 2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik. |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|--|---|---|--|
| | | 3. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik, 2. Meningkatkan tingkat utilisasi penggunaan sarana dan prasarana BPS dalam rangka meningkatkan pelayanan prima hasil kegiatan statistik. |
| | | 4. Peningkatan penggunaan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional | 1. Meningkatkan kemudahan konsumen dalam membaca hasil data statistik |
| T.3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel | SS.3.1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja 2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pembangunan keseluruhan sistem manajemen SDM aparatur yang terintegrasi dan komprehensif, 2. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur, termasuk Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang teknis statistik dan TI, pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik, 3. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga statistisi dan pranata komputer) yang baru. |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI |
|--------|--|---|---|
| | SS.3.2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja 2. Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengawasan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran; 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS |

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Statistik

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2015 – 2019) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2015 - 2019.

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada *distorsi*, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi (Indeks Harga Konsumen), Ekspor dan Impor, Nilai Tukar Petani, Industri, Pertambangan, Keuangan Daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

3.2.2 Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan statistik, penyusunan program dan kegiatan dalam Renstra BPS 2015-2019 mengacu pada sasaran strategis yang telah ditetapkan. BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS, (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, (iii) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi.

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh 2 (dua) program generik yaitu: Program DMPTTL dan Program PSPA.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi.

Program Teknis BPS Provinsi adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik yang merupakan dekonsentrasi kegiatan dari masing-masing Eselon II di BPS (pusat). Sedangkan untuk Program Generik, pada setiap Satuan Kerja Eselon II BPS Provinsi disediakan dua program, yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi, dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Provinsi.

Demikian pula bagi BPS Kabupaten/Kota disediakan Program Teknis dan Program Generik yang sama dengan BPS Provinsi.

Prioritas kegiatan BPS dilaksanakan dengan didasarkan kepada:

- a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Penyediaan data strategis yang mendukung Visi dan Misi RPJM Nasional.

Penyelenggaraan Sensus Pertanian 2013, Sensus Ekonomi 2016, dan Sensus Penduduk 2020 telah ditetapkan sebagai Isu Strategis. Sedangkan kegiatan survei BPS lainnya tetap merupakan prioritas Kementerian/Lembaga.

Berikut ini dipaparkan rekapitulasi program dan kegiatan BPS dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPS, baik yang bersifat teknis maupun generik dalam kurun waktu 2015 – 2019.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi, Program dan Kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|---|--|---|---|--------------|--|
| T.1. Peningkatan kualitas data statistik | SS.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS | 1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas | 1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk pengumpulan serta pengolahan data dan informasi statistik, | Program PPIS | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi, ▪ Pengembangan Dan Analisis Statistik, ▪ Pelayanan Dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik. ▪ Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran. ▪ Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi. ▪ Pengembangan Metodologi Sensus Dan Survei, ▪ Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Distribusi, ▪ Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Harga, |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|--------|-------------------|----------------|----------|---------|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan Dan Penggalian, Energi, Dan Konstruksi, ▪ Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Kependudukan Dan Ketenagakerjaan, ▪ Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, ▪ Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, ▪ Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, Dan Pariwisata, ▪ Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, Dan Kehutanan, ▪ Penyediaan Dan Pengembangan Statistik |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|--------|--|----------------------------|---|--------------|---|
| | | | | | Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan, |
| | SS.2. Meningkatnya Kualitas hubungan Dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>) | 1.Peningkatan respons rate | 1. Meningkatkan komunikasi dengan penyedia data | Program PPIS | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, ▪ Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat, ▪ Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial, ▪ Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan, ▪ Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan, ▪ Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|--------|-------------------|----------------|---|--------------|---|
| | | | | | <p>dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi, ▪ Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga, ▪ Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, ▪ Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, Penyediaan dan ▪ Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran. |
| | | | 2. Meningkatkan sosialisasi kegiatan BPS. | Program PPIS | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|--|---|---|--|--------------|---|
| T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik | SS.3. Meningkatnya Kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) | 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyebaran data dan informasi statistik kepada masyarakat | 1. Meningkatkan diseminasi hasil kegiatan statistik 2. Meningkatkan Customer Relationship Management 3. Meningkatkan sosialisasi kegiatan statistik | Program PPIS | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik |
| | | 2. Peningkatan kemudahan dan kecepatan akses terhadap data dan informasi statistik BPS | 1. Meningkatkan kualitas website BPS dan atau PST didukung oleh TIK dan infrastruktur yang memadai 2. Mengoptimalkan sistem informasi statistik dalam mendukung kualitas diseminasi data informasi statistik. | Program PPIS | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|--|---|--|---|----------------|--|
| | | 3. Pemenuhan sarana dan prasarana BPS secara akuntabel dalam mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik | 1. Meningkatkan efektivitas pemenuhan sarana dan prasarana BPS yang mendukung pelayanan prima hasil kegiatan statistik | Program PSPA | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi |
| | | 3. Peningkatan penggunaan data BPS dalam | 1. Meningkatkan kemudahan konsumen dalam membaca hasil data statistik | Program PPIS | <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi |
| T.3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel | SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS | 1. Penguatan fungsi yang terkait dengan sistem manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja 2. Penyelarasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi | 1. Mengoptimalkan pengembangan kompetensi SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional, dan jarak jauh 2. Mengoptimalkan penyiapan kebutuhan insan statistik (tenaga | Program DMPTTL | <ul style="list-style-type: none"> Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | ARAH KEBIJAKAN | STRATEGI | PROGRAM | KEGIATAN |
|--------|--|---|---|----------------|--|
| | | BPS khususnya yang terkait dengan system manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja | statistisi dan pranata komputer) yang baru | | |
| | SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan fungsi yang terkait dengan Sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja 2. Penyelerasan kegiatan yang terkait dengan reformasi birokrasi BPS khususnya yang terkait dengan sistem pengawasan aparatur dan akuntabilitas kinerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran 2. Meningkatkan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS | Program DMPTTL | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi |

Berdasarkan hasil pemetaan tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi BPS, maka dapat diinventarisasi kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis 2015 – 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi;
 - b. Pengembangan dan Analisis Statistik;
 - c. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
 - d. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
 - e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
 - f. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
 - g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
 - h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
 - i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
 - j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
 - k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
 - l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
 - m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
 - n. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
 - o. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.
2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS, dengan kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi.

3.3. Kerangka Regulasi

Secara umum regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan regulasi mengenai struktur organisasi BPS. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan statistik dan menjadi payung hukum bagi BPS dalam melaksanakan kegiatan statistik adalah UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Adapun regulasi mengenai struktur organisasi BPS utamanya adalah untuk mendukung penyelenggaraan statistik sebagai amanat UU.

BPS memiliki peran sentral untuk menghasilkan data statistik berkualitas yang digunakan sebagai acuan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan nasional. Penyajian data statistik yang dapat dipercaya sangat bergantung pada kualitas data hasil survei maupun sensus.

Pada proses penyelenggaraan statistik seringkali ditemui sejumlah kendala dalam upaya pengumpulan data karena regulasi yang kurang kuat.

Sebagai suatu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPS harus mematuhi sejumlah regulasi yang berlaku. Regulasi yang mengatur BPS dapat dibagi ke dalam dua kelompok:

(1) Regulasi mengenai struktur organisasi BPS

- a. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 (yang diamandemen dengan Peraturan Presiden No. 64 tahun 2005) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Sebagai suatu LPNK, maka BPS dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh Sekretaris Utama, para Deputi dan Inspektorat Utama.
- b. Peraturan Presiden No. 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
- c. Peraturan Kepala BPS No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS
- d. Peraturan Kepala BPS No. 121 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah
- e. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik No. 3 tahun 2002 tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di Daerah
- f. Peraturan Kepala BPS No. 101 tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
- g. Peraturan Kepala BPS No. 2 tahun 2002 tentang Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
- h. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/417/M.Pan/02/2008 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja BPS
- i. Surat Keputusan Menteri PAN dan RB No. B/174.1/M.Pan/07/2001 tentang Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BPS
- j. Peraturan Kepala BPS No.116 tahun 2014 perubahan atas Perka BPS No.7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana
- k. Surat Menteri PAN dan RB No. B/2001/M.pan/05/2014 tentang Persetujuan Perubahan Organisasi dan Tata Laksana BPS

(2) Regulasi mengenai bagaimana BPS menyelenggarakan kegiatan statistik. Berikut adalah regulasi yang menjadi payung hukum bagi BPS dan instansi pemerintah lainnya di dalam menyelenggarakan kegiatan statistik.

a. UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik Intisari dari regulasi:

- Berisikan klasifikasi jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, yakni statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus,
- Mengatur entitas yang dapat melakukan penyelenggaraan statistik dasar, sektoral dan khusus.

b. PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Intisari dari regulasi:

- Berisikan penjelasan teknis tentang penyelenggaraan statistik dasar, sektoral, dan khusus.

- Mengatur bentuk koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan statistik antara BPS, instansi pemerintah, dan masyarakat,
 - Peran BPS di dalam melakukan pembinaan statistik,
 - Sumber pembiayaan penyelenggaraan statistik dasar.
- c. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah Intisari dari regulasi:
- Mengatur tentang teknis penyelenggaraan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
 - Peran BPS dan Pemerintah Daerah di dalam penyelenggaraan statistik sektoral

3.4. Kerangka Kelembagaan

Pesatnya perkembangan teknologi, tingginya permintaan masyarakat akan ketersediaan data yang relevan dan up to date, serta meningkatnya permintaan keterbandingan data, mengisyaratkan bahwa BPS harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu, serta mengacu standar nasional dan internasional, melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada *distorsi*, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM), serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Selama kurun waktu 2015-2018, BPS akan melakukan suatu upaya untuk mentransformasi statistik dalam suatu program yang disebut *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics* (Statcap-CERDAS). Tujuan dari program ini adalah dalam rangka pencapaian visi BPS. Pertama, kualitas data harus ditingkatkan menjadi jauh lebih baik. Hal ini memerlukan adanya keterpaduan statistik (*statistical integration*) dan dijalankannya *Statistical Quality Assurance Framework* secara konsisten.

Kedua, perlunya membangun arsitektur TIK yang mendukung tercapainya visi BPS melalui: manajemen data yang mendukung keterpaduan statistik, data *warehouse* sebagai *enabler* keterpaduan statistik, perbaikan infrastruktur jaringan yang memudahkan pertukaran data antar kantor statistik daerah di seluruh Indonesia, perbaikan dalam hal keamanan data untuk menjamin kerahasiaan termasuk pada saat pertukaran data.

Ketiga, perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui penataan sistem manajemen SDM yang lebih baik dan berbasis kepada kompetensi. Hal ini mencakup perencanaan, rekrutmen, pengembangan kompetensi karyawan, manajemen kinerja, manajemen karir hingga penggajian. Selain dari penataan sistem, BPS telah mencanangkan nilai-nilai inti yang menjadi pedoman bagi karyawan untuk menjalankan perannya secara efektif, yaitu: Profesional, Integritas dan Amanah atau disingkat PIA. Budaya kerja ini harus dijalankan secara konsisten oleh setiap insan BPS sehingga agenda reformasi BPS berjalan seperti yang diharapkan.

Keempat, perlunya pengelolaan kelembagaan untuk mendukung lancarnya program STATCAP-CERDAS mencapai BPS masa depan. Pengelolaan kelembagaan mencakup semua aspek mulai dari

perencanaan strategis, Tata Kelola Yang Baik (*Good Public Governance*), analisis beban kerja, kerangka aturan hukum yang berlaku, dan penetapan budaya kerja yang diinginkan.

3.4.1. Kebutuhan Fungsi dan Struktur Organisasi

Penataan fungsi dan struktur organisasi BPS dilakukan dengan mengakomodir perubahan dinamika baik internal maupun eksternal melalui penguatan kelembagaan. Beberapa pertimbangan dalam penguatan kelembagaan di antaranya adalah: saat ini struktur organisasi BPS gemuk, tidak efektif, dan efisien, adanya rencana pengembangan proses bisnis dan produk statistik, jadwal kegiatan yang tumpang tindih serta lemahnya UU dan regulasi penunjang kegiatan statistik. Tujuan penguatan kelembagaan yang akan dilakukan tahun 2015-2019 adalah meningkatkan peran BPS sebagai pusat sumber data statistik dan tata kelola statistik daerah.

3.4.2. Kebutuhan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Sebagai dampak dari perubahan proses bisnis yang dilakukan dan pembangunan system dan aplikasi agar lebih efektif dan efisien, maka pengembangan sumberdaya manusia (SDM) BPS juga menjadi target Program Statcap-CERDAS. Isu strategis SDM BPS saat ini adalah:

1. Arah Strategis dan peran kebijakan SDM kurang memadai untuk mendukung manajemen SDM yang kuat di BPS;
2. Terbatasnya *tools* dan infrastruktur untuk mendukung fungsi manajemen SDM;
3. Belum terintegrasinya fungsi manajemen administrasi kepegawaian Internal BPS dan institusi lain;
4. Adanya gap kompetensi antara SDM Pusat dan daerah.

Berdasarkan isu tersebut, tujuan pengelolaan dan pengembangan SDM dalam aktivitas Statcap CERDAS, adalah:

1. Menempatkan SDM BPS sebagai penggerak (*driver*) transformasi;
2. Pengelolaan SDM berbasis kompetensi (CBHRM).

Adapun cakupan yang dilakukan dalam transformasi SDM BPS ini adalah:

1. Perencanaan dan Peningkatan SDM
Analisis dilakukan antara lain analisis beban kerja.
2. Peningkatan Kebijakan dan prosedur SDM
Pada kegiatan ini fokus terhadap (i) rekrutmen, seleksi dan *assessment*; (ii) manajemen kinerja; dan (iii) manajemen karir.
3. Peningkatan pengembangan SDM:
Aktivitas yang dilakukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan SDM antara lain:

- a. Meningkatkan persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I dengan memberikan usul izin belajar dan tugas belajar;
- b. Meningkatkan jumlah pegawai yang memegang jabatan fungsional tertentu melalui pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun fungsional;

BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan



4.1 Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2015-2019 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra BPS 2015 – 2019 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2015 – 2019 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015 – 2019 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Target Kinerja 2019

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | TARGET KINERJA (2019) |
|---|--|---|-----------------------|
| T.1. Peningkatan kualitas data statistik | SS.1. Meningkatnya Kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS | IKSS 1.1. Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik | 90 |
| | | IKSS 1.2. Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama | 82 |
| | | IKSS 1.3. Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS | 100 |
| | | IKSS 1.4. Jumlah Release Data yang tepat waktu | 16 |
| | | IKSS 1.5. Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu | 35 |
| | | IKSS 1.6. Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu | 1 |
| | SS.2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>) | IKSS 2.1. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan rumah tangga | 89 |
| | | IKSS 2.2. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan usaha | 95 |
| | | IKSS 2.3. Persentase pemasukan dokumen (<i>response rate</i>) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha | 99 |

| TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS | TARGET KINERJA (2019) |
|--|--|---|-----------------------|
| T.2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik | SS.3. Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>) | IKSS 3.1. Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS | 92 |
| | | IKSS 3.2. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS | 52000 |
| | | IKSS 3.3. Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional | 8,50 |
| | | IKSS 3.4. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS | 85 |
| | | IKSS 3.5. Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS | 85 |
| T.3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel | SS.4. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS | IKSS 4.1. Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu | 24 |
| | | IKSS 4.2. Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I | 78 |
| | SS.5. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS | IKSS 5.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | 60 |

4.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2015 – 2019, BPS Provinsi Kalimantan Timur akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 2 (dua) program generik. Ketiga program yang akan dijalankan oleh BPS Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS), dengan kegiatan:
 - a. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi;
 - b. Pengembangan dan Analisis Statistik;
 - c. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
 - d. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
 - e. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
 - f. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
 - g. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
 - h. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
 - i. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
 - j. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
 - k. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
 - l. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
 - m. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
 - n. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
 - o. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan.
2. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS, dengan kegiatan:
 - a. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dengan kegiatan:
 - a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi.

Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan ketiga program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.

Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan dari masing-masing program dan kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 2015 – 2019 dapat dilihat pada Lampiran 1.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan BPS Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Program, Kegiatan dan Alokasi Pendanaan BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019

| PROGRAM | KEGIATAN | ALOKASI PENDANAAN | | | | |
|--|--|-------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) | Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi | 11.547.300.000 | 8.180.725.000 | 14.339.665.000 | 15.098.569.000 | 21.409.903.000 |
| | Pengembangan dan Analisis Statistik | 789.924.000 | 837.260.000 | 887.554.000 | 940.807.000 | 997.018.000 |
| | Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik | 173.805.000 | 184.194.000 | 195.449.000 | 207.136.000 | 219.473.000 |
| | Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran | 269.276.000 | 285.553.000 | 302.760.000 | 320.897.000 | 340.429.000 |
| | Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi | 404.508.000 | 429.067.000 | 455.071.000 | 481.797.000 | 511.412.000 |
| | Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei | 16.407.000 | 17.390.000 | 18.434.000 | 19.540.000 | 20.707.000 |
| | Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi | 514.447.000 | 255.029.000 | 171.777.000 | 72.069.000 | 83.427.000 |
| | Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga | 832.912.000 | 1.293.971.000 | 7.323.425.000 | 1.350.312.000 | 1.051.703.000 |
| | Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Peggalian, Energi, dan Konstruksi | 663.483.000 | 703.669.000 | 746.315.000 | 790.601.000 | 838.168.000 |

| PROGRAM | KEGIATAN | ALOKASI PENDANAAN | | | | |
|---------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan | 3.224.103.000 | 881.044.000 | 751.733.000 | 1.031.390.000 | 13.302.758.000 |
| | Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat | 1.061.259.000 | 1.124.938.000 | 1.192.611.000 | 1.264.056.000 | 1.339.939.000 |
| | Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial | 2.471.146.000 | 1.189.682.000 | 1.257.218.000 | 7.520.795.000 | 1.539.485.000 |
| | Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata | 616.213.000 | 652.808.000 | 691.763.000 | 733.268.000 | 777.264.000 |
| | Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan | 124.686.000 | 132.644.000 | 140.602.000 | 148.560.000 | 157.845.000 |
| | "Penyediaan Dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan | 385.131.000 | 193.476.000 | 204.953.000 | 217.341.000 | 230.275.000 |

| PROGRAM | KEGIATAN | ALOKASI PENDANAAN | | | | |
|--|--|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi (DMPTTL) | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi | 8.624.430.000 | 9.133.890.000 | 9.716.130.000 | 10.298.370.000 | 10.917.000.000 |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA) | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi | 2.516.361.000 | 699.610.000 | 502.500.000 | 295.000.000 | 95.000.000 |

BAB 5

Penutup



Rencana Strategis (Renstra) BPS Provinsi Kalimantan Timur periode 2015 – 2019 adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur disusun mengacu pada Renstra BPS Tahun 2015-2019 dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015 – 2019 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS tahun 2015 -2019 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi BPS Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan dengan mengacu pada tujuan strategis BPS, 3 (tiga) tujuan strategis BPS Provinsi Kalimantan Timur yakni:

1. Peningkatan kualitas data statistik;
2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Dalam Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015 – 2019, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja. Pelaksanaan pembangunan statistik dilakukan secara menyeluruh oleh BPS melalui upaya mentransformasi seluruh kegiatan statistik dalam program *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia* (Statcap CERDAS).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra BPS Provinsi Kalimantan Timur 2015-2019 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran BPS Provinsi Kalimantan Timur dari level Satker BPS Provinsi sampai dengan Satker BPS Kabupaten/Kota dengan menjunjung tinggi nilai-nilai inti (*core values*) BPS yakni profesional, integritas, dan amanah.

Lampiran



Matriks Kinerja dan Pendanaan BPS Provinsi Kalimantan Timur

| Program/ Kegiatan | Tujuan/Sasaran/Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | | | Alokasi Anggaran | | | | |
|--|--|-----------|----------------|------|------|------|------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR | | | | | | | | 22.688.091 | 17.943.605 | 24.483.296 | 25.612.488 | 32.337.707 |
| T1 | Tujuan 1. Peningkatan kualitas data statistik | | | | | | | | | | | |
| | Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik | Persen | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| SS.1 | Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS | | | | | | | | | | | |
| | IKSS 1.1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik | Persen | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | |
| | IKSS 1.2 Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama | Persen | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | | | | | |
| | IKSS 1.3 Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | IKSS 1.4 Jumlah Release Data yang tepat waktu | Aktivitas | 78 | 76 | 76 | 78 | 76 | | | | | |
| | IKSS 1.5 Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu | publikasi | 40 | 37 | 35 | 36 | 35 | | | | | |
| | IKSS 1.6 Jumlah Publikasi/Laporan sensus yang terbit tepat waktu | Publikasi | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| SS.2 | Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement) | | | | | | | | | | | |
| | IKSS 2.1 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga | Persen | 95 | 88 | 89 | 89 | 89 | | | | | |
| | IKSS 2.2 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha | Persen | 92 | 93 | 95 | 95 | 95 | | | | | |
| | IKSS 2.3 Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga non usaha | Persen | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Tujuan/Sasaran/Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | | | Alokasi Anggaran | | | | |
|----------------------|--|------------|----------------|-------|-------|-------|-------|------------------|------|------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| T2 | Tujuan 2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik | | | | | | | | | | | |
| | Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS | Persen | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | | | | | |
| SS.3 | Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) | | | | | | | | | | | |
| | IKSS 3.1 Persentase Kepuasan Konsumen terhadap pelayanan data BPS | Persen | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | | | | | |
| | IKSS 3.2 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS | Pengunjung | 50000 | 51000 | 51000 | 52000 | 52000 | | | | | |
| | IKSS 3.3 Persentase konsumen yang menggunakan data BPS dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional | Persen | | 8,25 | 8,35 | 8,40 | 8,50 | | | | | |
| | IKSS 3.4 Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS | Persen | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | | | | | |
| | IKSS 3.5 Persentase Konsumen yang puas terhadap akses data BPS | Persen | 80 | 82 | 82 | 85 | 85 | | | | | |
| T3 | Tujuan 3. Peningkatan birokrasi yang akuntabel | | | | | | | | | | | |
| | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | point | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | | | | | |
| SS.4 | Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS | | | | | | | | | | | |
| | IKSS 4.1 Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu | Persen | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | | | | | |
| | IKSS 4.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I | Persen | 70 | 75 | 78 | 78 | 78 | | | | | |
| SS.5 | Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS | | | | | | | | | | | |
| | IKSS 5.1 Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | point | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Tujuan/Sasaran/Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | | | Alokasi Anggaran | | | | |
|--|---|-----------|----------------|------|------|------|------|------------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| PROGRAM 06 - Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik | | | | | | | | 11.547.300 | 8.110.105 | 14.264.666 | 15.019.118 | 21.325.707 |
| 2895 - Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi | | | | | | | | | | | | |
| | 1 Laporan Pengembangan Metodologi Sensus dan survei | Publikasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.407 | 17.390 | 18.434 | 19.540 | 20.707 |
| | Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | Jumlah Peta desa dan blok sensus yang diupdate | Peta | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 2 Laporan Diseminasi Statistik | Publikasi | 16 | 7 | 6 | 6 | 6 | 92.805 | 98.352 | 104.361 | 110.601 | 117.188 |
| | Jumlah Laporan Diseminasi Statistik yang terbit tepat waktu | Publikasi | 16 | 7 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei kebutuhan data | persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | 3 Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan | publikasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 801.464 | 881.044 | 751.733 | 1.031.390 | 1.093.273 |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang terbit tepat waktu | publikasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang memiliki ISSN/ISBN | publikasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei ketenagakerjaan dan kependudukan dengan pendekatan rumah tangga | Persen | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | |
| | 4 publikasi/laporan Sensus Penduduk | Publikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.209.485 |
| | Jumlah publikasi/laporan Sensus Penduduk yang terbit tepat waktu | Publikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| | 5 publikasi/laporan Survey Penduduk Antar Sensus | Publikasi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.422.639 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah publikasi/laporan Survey Penduduk Antar Sensus yang terbit tepat waktu | Publikasi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Tujuan/Sasaran/Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | | | Alokasi Anggaran | | | | |
|----------------------|---|-----------|----------------|------|------|------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Penduduk Antar Sensus | Persen | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 6 Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat | publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.061.259 | 1.124.938 | 1.192.611 | 1.264.056 | 1.339.939 |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang terbit tepat waktu | publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Kesejahteraan Rakyat yang memiliki ISSN/ISBN | publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Kesejahteraan Rakyat dengan pendekatan rumah tangga | Persen | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | |
| | 7 Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial | publikasi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 63.216 | 1.189.682 | 1.257.218 | 1.332.651 | 1.539.485 |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang terbit tepat waktu | publikasi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial yang memiliki ISSN/ISBN | publikasi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan rumah tangga | Persen | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Ketahanan Sosial dengan pendekatan non rumah tangga non usaha | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | 8 Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa | Publikasi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.188.144 | 0 |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Pendataan Potensi Desa yang tepat waktu | Publikasi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Pendataan Potensi Desa | Persen | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Tujuan/Sasaran/Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | | | Alokasi Anggaran | | | | |
|----------------------|---|-----------|----------------|------|------|------|------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 9 Basis data Terpadu Program Perlindungan Sosial | paket BDT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.407.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Persentase Basis data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang selesai tepat waktu | Persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 10 Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | publikasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 511.811 | 257.116 | 272.368 | 288.831 | 306.020 |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang terbit tepat waktu | publikasi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang memiliki ISSN/ISBN | publikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan rumah tangga | Persen | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan usaha | Persen | 60 | 78 | 78 | 78 | 78 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | 11 Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan | publikasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124.686 | 132.644 | 140.602 | 148.560 | 157.845 |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang terbit tepat waktu | publikasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang memiliki ISSN/ISBN | publikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Tujuan/Sasaran/Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | | | Alokasi Anggaran | | | | | |
|----------------------|--|-----------|----------------|------|------|------|------|------------------|---------|---------|---------|---------|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan rumah tangga | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan usaha | Persen | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Survei Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan dengan pendekatan non rumah tangga non usaha | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | |
| | 12 Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi | publikasi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 663.483 | 703.669 | 746.315 | 790.601 | 838.168 | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang terbit tepat waktu | publikasi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi yang memiliki ISSN/ISBN | publikasi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survei Industri , Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi dengan pendekatan usaha | Persen | 91 | 90 | 90 | 90 | 90 | | | | | | |
| | 13 Publikasi/Laporan Statistik Distribusi | Publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 225.350 | 255.029 | 171.777 | 72.069 | 83.427 | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang terbit tepat waktu | Publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Distribusi yang memiliki ISSN/ISBN | Publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Tujuan/Sasaran/Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | | | Alokasi Anggaran | | | | |
|----------------------|---|-----------|----------------|------|------|------|------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan usaha | Persen | 74 | 79 | 89 | 89 | 89 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik distribusi dengan pendekatan non rumah tangga non usaha | Persen | 85 | 93 | 96 | 96 | 96 | | | | | |
| | 14 publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016 | Publikasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jumlah publikasi/laporan Sensus Ekonomi 2016 yang terbit tepat waktu | Publikasi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Sensus Ekonomi 2016 | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 15 Publikasi/Laporan Statistik Harga | Publikasi | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 832.912 | 1.293.971 | 1.333.718 | 1.350.312 | 1.051.703 |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang terbit tepat waktu | Publikasi | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Harga yang memiliki ISSN/ISBN | Publikasi | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan rumah tangga | Persen | 85 | 82 | 88 | 88 | 88 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik harga dengan pendekatan usaha | Persen | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | | | | | |
| | 16 Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup | Publikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.989.707 | 0 | 0 |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Survei Harga Biaya Hidup yang terbit tepat waktu | Publikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei biaya hidup | Persen | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Tujuan/Sasaran/Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | | | Alokasi Anggaran | | | | |
|----------------------|--|-----------|----------------|------|------|------|------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | 17 Publikasi/Laporan Survei Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) | Publikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) yang terbit tepat waktu | Publikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) Survey Penyempurnaan Diagram Timbang (2017=100) | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 18 Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata | Publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 616.213 | 652.808 | 691.763 | 733.268 | 777.264 |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang terbit tepat waktu | Publikasi | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata yang memiliki ISSN/ISBN | Publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan usaha | Persen | 92 | 95 | 99 | 100 | 100 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei statistik survei statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata dengan pendekatan non rumah tangga non usaha | Persen | 81 | 91 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | 19 Publikasi/Laporan Neraca Produksi | Publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 404.508 | 429.067 | 455.071 | 481.797 | 511.412 |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang terbit tepat waktu | Publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Produksi yang memiliki ISSN/ISBN | Publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Tujuan/Sasaran/Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | | | Alokasi Anggaran | | | | |
|----------------------|--|-----------|----------------|------|------|------|------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca produksi dengan pendekatan usaha | persen | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | 20 Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran | Publikasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 269.276 | 285.553 | 302.760 | 320.897 | 340.429 |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang terbit tepat waktu | Publikasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Neraca Pengeluaran yang memiliki ISSN/ISBN | Publikasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan rumah tangga | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan usaha | persen | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei neraca pengeluaran dengan pendekatan non rumah tangga non usaha | persen | 100 | 99 | 99 | 99 | 99 | | | | | |
| | 21 Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik | Publikasi | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 744.244 | 788.842 | 836.228 | 886.401 | 939.362 |
| | Jumlah Publikasi/Laporan analisis dan pengembangan statistik yang terbit tepat waktu | Publikasi | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | |
| | Jumlah Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik yang memiliki ISSN/ISBN | Publikasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan rumah tangga | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

| Program/ Kegiatan | Tujuan/Sasaran/Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | | | Alokasi Anggaran | | | | |
|---|---|-----------|----------------|------|------|------|------|------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei analisis dan pengembangan statistik dengan pendekatan usaha | persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| PROGRAM 01 : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS | | | | | | | | 8.624.430 | 9.133.890 | 9.716.130 | 10.298.370 | 10.917.000 |
| KEGIATAN 2886 : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi | | | | | | | | 8.624.430 | 9.133.890 | 9.716.130 | 10.298.370 | 10.917.000 |
| | Layanan Perkantoran | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah Laporan Dukungan Manajemen | Laporan | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | | | | | |
| | Persentase pembayaran upah dan Gaji yang tepat waktu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |
| | Persentase Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Kondisi baik | Persen | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | | | | | |
| | Persentase Sarana dan Prasarana Lainnya dalam kondisi Baik | Persen | 70 | 80 | 85 | 90 | 90 | | | | | |
| PROGRAM 02: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | | | | | | 2.516.361 | 699.610 | 502.500 | 295.000 | 95.000 |
| 2891 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS Provinsi | | | | | | | | 2.516.361 | 699.610 | 502.500 | 295.000 | 95.000 |
| | Jumlah Pengadaan kendaraan Bermotor | pengadaan | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | | - | 280.000 | 295.000 | 0 |
| | Persentase pengadaan kendaraan bermotor yang diselesaikan | Persen | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | | | | | |
| | Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi | pengadaan | 71 | 47 | 0 | 0 | 5 | | 459.400 | | | 10.000 |
| | Persentase pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi yang diselesaikan | Persen | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | | | | | |
| | Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas | pengadaan | 45 | 44 | 445 | 0 | 1 | | 42.210 | 222.500 | | 85.000 |
| | Persentase pengadaan peralatan dan fasilitas yang diselesaikan | Persen | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | | | |
| | Jumlah pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan | m2 | 739 | 450 | 0 | 0 | 0 | | 198.000 | | | |

| Program/ Kegiatan | Tujuan/Sasaran/Indikator | Satuan | Target Kinerja | | | | | Alokasi Anggaran | | | | |
|----------------------|---|--------|----------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | Persentase pengadaan tanah dan pengadaan, rehabilitasi, revitalisasi, dan pembangunan gedung/bangunan yang diselesaikan | Persen | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

DATA

Mencerdaskan Bangsa



Jl. Kemakmuran No. 4 Samarinda 75117 Telp: (0541) 732793, Fax (0541) 201121
Homepage:<http://www.kaltim.bps.go.id> email: kaltim@bps.go.id